

**EVALUASI KEPATUHAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PELAPORAN KERJA SAMA
DAERAH PADA SUB DIREKTORAT KERJA SAMA
DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR
DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Diajukan Oleh:

DAFFA SYALASI

NIM. 07011282126155

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**EVALUASI KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PELAPORAN KERJA SAMA DAERAH PADA SUB DIREKTORAT
KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR
DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik**

Oleh :

DAFFA SYALASI

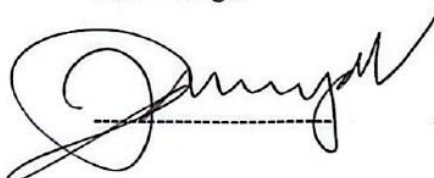
07011282126155

Pembimbing

**Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H.,
M.Si.
NIP. 198801272019031005**

Tanda Tangan

Tanggal

 _____

**Mengetahui,
Ketua Jurusan,**


**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**EVALUASI KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PELAPORAN KERJA SAMA DAERAH PADA SUB DIREKTORAT
KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR
DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

SKRIPSI

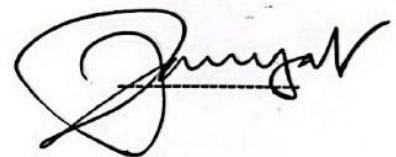
**Oleh :
DAFFA SYALASI
07011282126155**

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 24 Maret 2025**

Pembimbing :

**Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si.
NIP. 198801272019031005**

Tanda Tangan



Penguji :

**1. Rizky Ghoffar Ismail, S.Psi., M.Si
NIP. 198806032023211013**

**2. Rahmat Rafinzar, S.IP., M.A.P
NIP. 199705052024061001**

Tanda Tangan



Mengetahui,



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daffa Syalasi
NIM : 07011282126155
Jurusan : Administrasi Publik
Kampus : Indralaya
Angkatan : 2021

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Evaluasi Kepatuhan Pemerintah Daerah Dalam Pelaporan Kerja Sama Daerah Pada Sub Direktorat Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah Kementerian Dalam Negeri" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatukan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Indralaya,



Daffa Syalasi

NIM. 07011282126155

“Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(QS Al-Baqarah: 216)

“Hidup bukan untuk saling mendahului. Bermimpilah sendiri-sendiri. Tak ada yang tahu. Kapan kau mencapai tuju”

(Baskara-Hindia)

“Tugas akhir yang baik adalah tugas akhir yang selesai, maka selesaikanlah tugas akhir dengan baik”

(H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D.)

“Pelan tapi pasti, asal jangan berhenti”

(Penulis)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan Ridho Allah SWT Skripsi ini saya persembahkan kepada:

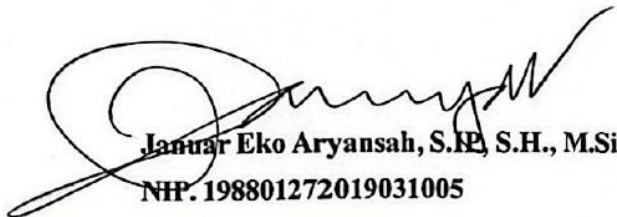
1. Kedua Orang Tua, yaitu Bapak Nurdin dan Ibu Dian Rahayu
2. Diri saya sendiri, Daffa Syalasi
3. Adik Perempuan saya, Dyaniffa Bijuga
4. Keluarga Besar
5. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI
6. Seluruh Rekan Mahasiswa Administrasi Publik 2021
7. Almamater Kebanggaan Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Pelaporan kerja sama daerah penting untuk efektivitas dan transparansi pemerintahan, namun tingkat kepatuhan pemerintah daerah masih rendah. Penelitian ini mengevaluasi kepatuhan serta faktor yang memengaruhi keterlambatan pelaporan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman regulasi, serta lemahnya pengawasan dan sanksi menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan regulasi, dan optimalisasi sistem monitoring agar pelaporan kerja sama daerah lebih efektif.

Kata Kunci: Kepatuhan, Pelaporan, Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah, Evaluasi

Pembimbing,



Januar Eko Aryansah, S.IP, S.H., M.Si.
NIP. 198801272019031005

Palembang, Maret 2025
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



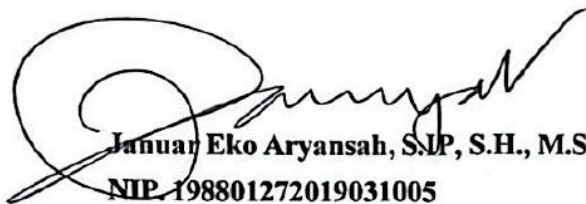
Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

Regional cooperation reporting is essential for government effectiveness and transparency, yet local government compliance remains low. This study evaluates compliance levels and factors causing reporting delays using a qualitative approach through interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that limited human resources, lack of regulatory understanding, and weak monitoring and sanction mechanisms are key obstacles. Therefore, enhancing staff capacity, strengthening regulations, and optimizing monitoring systems are necessary for more effective regional cooperation reporting.

Keywords: *Compliance, Reporting, Regional Cooperation, Local Government, Evaluation*

Advisor,



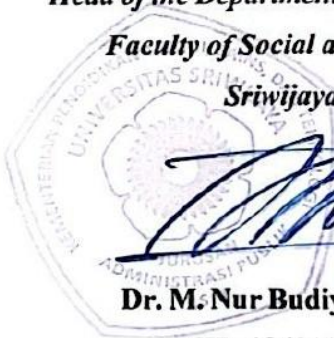
Januar Eko Aryansah, S.IP, S.H., M.Si.
NIP. 198801272019031005

Palembang, March 2025

Head of the Department of Public Administration

Faculty of Social and Political Sciences

Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Evaluasi Kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Pelaporan Kerja Sama Daerah pada Sub Direktorat Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah Kementerian Dalam Negeri". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Proses penyusunan skripsi ini merupakan perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, membutuhkan dedikasi, kerja keras, serta dukungan dari berbagai pihak. Sepanjang perjalanan ini, tidak terhitung rintangan dan hambatan yang harus dihadapi, namun berkat doa serta dukungan dari keluarga, teman, dosen, dan berbagai pihak lainnya, penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Sebagai anak pertama dalam keluarga, penulis merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan yang terbaik sebagai wujud rasa syukur serta kebanggaan bagi keluarga. Semangat dan doa dari kedua orang tua tercinta menjadi kekuatan terbesar dalam menyelesaikan tugas akademik ini. Tanpa doa, dukungan, dan pengorbanan mereka, perjalanan ini tentu tidak akan semulus yang telah dilalui.

Selain itu, peran dosen pembimbing, para pengajar, serta teman-teman sejawat sangatlah berarti dalam proses penyempurnaan skripsi ini. Setiap saran, masukan, dan bantuan yang diberikan sangat membantu penulis dalam memahami dan mengembangkan penelitian ini agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan rasa terima kasih yang mendalam, penulis ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, berkat izin, karunia, dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik hingga pada titik ini.
2. Penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT dan shalawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya ilmu dan petunjuk

bagi seluruh umat manusia. Berkat ajaran dan keteladanan beliau, penulis mendapatkan inspirasi untuk terus berusaha, berjuang, dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan untuk mengikuti jejak beliau dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan penuh keberkahan.

3. Untuk kedua orang tua, Bapak Nurdin dan Ibu Dian Rahayu, yang dengan penuh cinta tanpa syarat, kesabaran yang tak terbatas, dan doa yang selalu dipanjatkan, telah menjadi sumber cahaya dan kekuatan dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Tanpa henti, mereka selalu memberikan dukungan, semangat, dan pengorbanan yang sangat berarti, menjadikan harapan mereka sebagai motivasi dan tujuan dalam setiap usaha yang penulis lakukan.
4. Adik penulis, Dyaniffa Bijuga, yang selalu menjadi penyemangat, sumber kebahagiaan, dan dukungan tanpa henti. Kehadirannya begitu berharga bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa studi, senantiasa mampu menghilangkan rasa lelah dan memberikan energi baru untuk terus melangkah maju.
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
8. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., S.H., M.Si., sebagai dosen pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah membimbing serta memberikan arahan selama proses penyusunan penelitian ini. Setiap saran dan masukan yang beliau berikan sangat berharga bagi penulis dan berperan penting dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tengku Syahdana dan Saudara Tengku Fathan Aiman atas bantuan dan dukungannya dalam memberikan kesempatan kepada

penulis untuk melakukan kegiatan magang. Berkat kesempatan tersebut, penulis memperoleh pengalaman dan wawasan yang berharga, yang akhirnya menjadi dasar dalam penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat dan senantiasa diberikan kesuksesan dalam setiap langkah.

10. Ibu Ety Setyorini S.H., selaku Kasubdit Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan izin penelitian di Sub Direktorat Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah Kementerian Dalam Negeri.
11. Saudara Yosefhan, Galuh, Afra, Ary, Hindarto selaku staf pada Sub Direktorat Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah Kementerian Dalam Negeri yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi dalam penelitian ini. Berkat kerjasama mereka, penulis dapat mengumpulkan data penelitian dengan optimal.
12. Bapak Antoni, S.Sos., selaku Kasubbag Penataan Daerah & Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan izin penelitian di Sub Bagian Penataan Daerah & Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan.
13. Bapak Rizki Arjuna Putra, yang telah membantu proses administrasi izin penelitian Sub Bagian Penataan Daerah & Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan. Berkat bantuannya, penulis dapat mengumpulkan data penelitian secara optimal.
14. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Administrasi Publik angkatan 2021 yang telah menjadi tempat berbagi cerita, motivasi, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Ariq, Rido, Ryan, Bagus, Kevin, Petrin, Nia, dan Nisa, yang telah menjadi keluarga bagi penulis di perantauan. Terima kasih atas dukungan, semangat, serta kebahagiaan yang selalu diberikan. Kebersamaan, tawa, diskusi, dan saling menyemangati di saat lelah telah membuat perjalanan akademik ini terasa lebih ringan dan

bermakna. Kehadiran kalian menjadikan perantauan ini terasa seperti rumah sendiri.

16. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemilik NIM 1203621037, yang dengan tulus bersedia berbagi cerita, keluh kesah, serta semangat selama proses penulisan skripsi ini. Dukungan, inspirasi, dan kebersamaan yang telah terjalin menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat.
17. Terima kasih kepada *Metri Kost*, *Golden Hill*, *Holiday Kost*, dan *Ilfa Kost* yang telah menjadi tempat dan saksi bisu perjalanan akademik penulis hingga mencapai tahap penyusunan skripsi ini.
18. Terima kasih kepada *Fore Ryacudu*, *Djoes Kode Sudirman*, dan *Warkop Nuri* yang telah menghadirkan suasana segar dan menjadi tempat pelarian saat penulis merasa jenuh dalam proses penulisan skripsi ini.
19. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada *Sohib fotokopi* yang selalu siap sedia membantu selama proses pengerjaan skripsi ini. Ketersediaan, kesabaran, dan keramahan dalam melayani setiap kebutuhan cetak, penjilidan, serta berbagai keperluan lainnya telah memberikan kemudahan yang tak ternilai.
20. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada *streamer Dean KT* dan *Keluarga Kecil Bala-Bala* yang telah menjadi sumber hiburan serta semangat selama proses penulisan skripsi ini. Kehadiran kalian dengan konten yang menghibur, canda tawa, dan kebersamaan yang hangat telah menjadi pelipur lara di tengah penatnya perjalanan akademik ini. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai kalian semua.
21. Terima kasih kepada Baskara Putra (Hindia), yang melalui lirik dan musiknya telah menjadi pengingat bahwa hidup bukanlah perlombaan dan bahwa tidak apa-apa untuk merasa lelah. Lagu-lagu seperti *Evaluasi*, *Secukupnya*, dan *Rumah ke Rumah* telah menemani perjalanan skripsi ini, memberi semangat di saat ragu, dan menjadi

teman dalam setiap prosesnya. Terima kasih telah menciptakan karya yang bukan hanya didengar, tapi juga dirasakan.

22. Penulis juga ingin berterima kasih kepada diri sendiri atas keteguhan hati, kerja keras, dan keberanian untuk terus melangkah meskipun banyak tantangan di perjalanan ini. Terima kasih telah bertahan dan tidak menyerah hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam hal isi maupun penyusunannya. Oleh karena itu, penulis sangat berharap mendapatkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan di masa yang akan datang. Di akhir tulisan ini, penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ini.

Palembang, 17 Maret 2025

DAFFA SYALASI
NIM.07011282126155

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Konsep Evaluasi Kebijakan	9
2.1.2 Teori yang Digunakan Penulis	16
2.2 Pemerintah Daerah	17
2.3 Pelaporan Kerja Sama Daerah	19
2.4 Penelitian Terdahulu	21
2.5 Kerangka Berpikir.....	29
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Definisi Konsep.....	30
3.3 Fokus Penelitian	32

3.4	Jenis dan Sumber Data	33
3.5	Informan Penelitian	34
3.6	Teknik Pengumpulan Data	36
3.7	Teknik Analisis Data	38
3.8	Teknik Keabsahan Data	39
3.9	Jadwal Penelitian	40
BAB IV		42
PEMBAHASAN		42
4.1	Deskripsi Wilayah Penelitian	42
4.1.1	Sub Direktorat Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah Kemendagri	42
4.1.2	Sub Bagian Penataan Daerah dan Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Selatan	48
4.2	Informan Penelitian	51
4.3	Hasil Penelitian	52
4.3.1	Bagaimana Tingkat Kepatuhan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan Dalam Melaporkan Kerja Sama Daerah.	52
4.3.2	Efektivitas	54
4.3.3	Efisiensi	58
4.3.4	Ketepatan	61
4.4	Pembahasan/Diskusi	64
BAB V		74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	32
Tabel 3.2 Informan Penelitian	35
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.....	40
Tabel 4.1 Informan Penelitian	52
Tabel 4.2 Matriks hasil penelitian	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Laporan Kerja Sama Kab/Kota Sumatera Selatan.....	5
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kemendagri	44
Gambar 4.2 Strtukur Organisasi Ditjen Bina Adwil	45
Gambar 4.3 Struktur Organisasi DKTPKS	46
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Subdit Kerja Sama	47
Gambar 4.5 Lokasi Gedung Ditjen Bina Adwil	48
Gambar 4.6 Struktur Organisasi pada Biro Pemerintahan dan Otda Sumsel.....	50
Gambar 4.7 Lokasi kantor Biro Pemerintahan dan Otda Sumsel	51
Gambar 4.8 Data pelaporan kerja sama daerah.....	55
Gambar 4.9 Tugas dan Tanggung jawab Subdit Kerja Sama.....	56
Gambar 4.10 Surat Permintaan Laporan.....	57
Gambar 4.11 Permendagri No. 22 Tahun 2020.....	59
Gambar 4.12 Format pelaporan kerja sama daerah.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	79
Lampiran 2. Pedoman Observasi.....	80
Lampiran 3. Pedoman Dokumentasi.....	81
Lampiran 4. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi.....	82
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian	84
Lampiran 6. Matriks Perbaikan Seminar Proposal.....	86
Lampiran 7. Matriks Perbaikan Ujian Komprehensif.....	87
Lampiran 8. Kartu Bimbingan Seminar Proposal.....	88
Lampiran 9. Kartu Bimbingan Ujian Komprehensif.....	89
Lampiran 10. Surat Keterangan Pengecekan Similarity.....	90
Lampiran 11. Dokumentasi Wawancara dengan Informan.....	91
Lampiran 12. Contoh Penyerahan <i>Hard Copy</i> Laporan Kerja Sama Daerah.....	92
Lampiran 13. Contoh Rapat Evaluasi Kerja Sama Daerah	93

DAFTAR SINGKATAN

DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU	: Undang-Undang
TKKSD	: Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Ditjen Bina Adwil	: Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
DKTPKS	: Direktorat Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama
Pokja	: Kelompok Kerja
Setda	: Sekretariat Daerah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dan peningkatan layanan publik adalah inti dari pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah daerah di Sumatera Selatan memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat lokal. Namun, keterbatasan sumber daya yang tersedia di masing-masing daerah di Sumatera Selatan seringkali menjadi kendala dalam mencapai target-target pembangunan dan pelayanan yang diharapkan.

Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah melalui kerja sama antar daerah. Kerja sama antar daerah khususnya pada provinsi Sumatera Selatan, memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk saling bertukar informasi, berbagi sumber daya, mengembangkan sinergi dalam menciptakan pembangunan yang merata dan pelayanan publik yang berkualitas. Melalui kerja sama, kabupaten/kota di Sumatera Selatan dapat saling melengkapi kekurangan dan memanfaatkan keunggulan masing-masing, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran maupun sumber daya.

Dalam konteks otonomi daerah, kerja sama antar daerah di Sumatera Selatan menjadi semakin penting untuk memastikan keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah, serta menciptakan integrasi layanan publik antar batas wilayah. Melalui kerja sama, kabupaten/kota di Sumatera Selatan dapat saling berkolaborasi dalam menemukan solusi kreatif untuk menyelesaikan pembangunan di tingkat lokal.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya kerja sama antar daerah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Pada Provinsi Sumatera Selatan, kerja sama ini memungkinkan daerah saling mendukung dalam perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyusunan kebijakan, serta pengawasan dan penegakan hukum, terutama untuk perkara yang melintasi batas administratif. Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah dapat dapat bersama-sama mencapai pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan kerja sama antar daerah di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Kebijakan ini menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama daerah harus dilaporkan secara berkala sebagai bagian dari mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Melalui pelaporan ini, Sub Direktorat Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah Kementerian Dalam Negeri berperan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kerja sama daerah di seluruh Indonesia. Data dan informasi yang diperoleh dari laporan daerah akan digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis, memberikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan, serta menyusun arah kebijakan pengembangan kerja sama daerah yang lebih baik di masa depan. Peran Sub Direktorat Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah Kemendagri sangat penting dalam mendukung pelaksanaan

kerja sama daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Sub Direktorat ini bertugas memfasilitasi, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan serta pelaporan kerja sama antar daerah agar sesuai ketentuan, termasuk dalam mendorong kepatuhan pemerintah daerah terhadap kewajiban pelaporan. Dengan demikian, pelaporan ini menjadi instrumen penting dalam meningkatkan sinergi antar daerah guna mendukung pembangunan yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Sub Direktorat Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah Kementerian Dalam Negeri, sering kali, pemerintah daerah di Sumatera Selatan lamban dalam melaporkan kerja sama antar daerah. Banyak pemerintah kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Sub Direktorat Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah Kementerian Dalam Negeri, bahkan beberapa daerah tidak melaporkan sama sekali pelaksanaan kerja sama yang telah dilaksanakan. Hal ini menyebabkan terkendalanya Sub Direktorat Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan monitoring dan evaluasi dimana kedua proses ini sangat diperlukan dalam penilaian tingkat efektivitas kerja sama antar daerah.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah daerah menjadi salah satu faktor terlambatnya pelaporan kerja sama daerah. Pada beberapa kabupaten/kota di Sumatera Selatan, kemampuan dan jumlah tenaga profesional yang mampu mengelola administrasi kerja sama masih belum maksimal. Keterbatasan ini mengakibatkan keterlambatan proses pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan agar proses pelaporan dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.

Selain itu, mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi bagi daerah yang tidak patuh dalam pelaporan masih lemah. Dengan kurangnya pengawasan yang ketat, dan sanksi yang efektif, sulit untuk memastikan bahwa pemerintah daerah melaporkan kerja sama yang dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan. Kondisi ini berakibat pada kurangnya data dan informasi yang lengkap terkait pelaksanaan kerja sama daerah di tingkat nasional, yang berakibat pada terhambatnya perencanaan dan kebijakan yang berbasis data di sektor pemerintahan. Berdasarkan hasil observasi penulis di Sub Direktorat Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah, hingga saat ini belum terdapat sanksi administratif yang tegas bagi daerah yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan kerja sama. Tindakan yang dilakukan hanya sebatas permintaan ulang pengiriman pelaporan melalui surat imbauan, tanpa tindak lanjut evaluasi menyeluruh atau sanksi administratif yang memberikan efek jera. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan dalam penerapan aturan turu memperburuk tingkat kepatuhan pelaporan kerja sama daerah.

Data yang penulis peroleh menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pemerintah daerah di Sumatera Selatan terhadap kewajiban pelaporan kerja sama daerah tahun 2020-2024 masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan, di mana masih banyak kabupaten/kota yang belum memenuhi kewajiban pelaporan sesuai batas waktu yang ditentukan.

Gambar 1.1 Data Laporan Kerja Sama Kab/Kota Sumatera Selatan

NO	Pemerintah Daerah	2020	2021	2022	2023	2024	Soft File	Hard File	Status	Keterangan
	Sumatera Selatan	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	Belum Lengkap	untuk segera melaporkan
1	Kabupaten Banyuasin	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	Belum Lengkap	untuk segera melaporkan
2	Kabupaten Empat Lawang	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	Belum Lengkap	untuk segera melaporkan
3	Kabupaten Lahat	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	Belum Lengkap	untuk segera melaporkan
4	Kabupaten Muara Enim	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	Belum Lengkap	untuk segera melaporkan
5	Kabupaten Musi Banyuasin	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	Belum Lengkap	untuk segera melaporkan
6	Kabupaten Musi Rawas	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	Belum Lengkap	untuk segera melaporkan
7	Kabupaten Musi Rawas Utara	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	Belum Lengkap	untuk segera melaporkan
8	Kabupaten Ogan Ilir	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	Belum Lengkap	untuk segera melaporkan
9	Kabupaten Ogan Komering Ilir	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	Belum Lengkap	untuk segera melaporkan
10	Kabupaten Ogan Komering Ulu	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	Belum Lengkap	untuk segera melaporkan
11	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	Belum Lengkap	untuk segera melaporkan
12	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	Belum Lengkap	untuk segera melaporkan
13	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✖	Belum Lengkap	1. Tahun 2020, 2021, 2024 Belum Upload Laporan 2. Tahun 2020, 2021, 2024 Rekap Data MOU PKS belum di upload 3. Tahun 2020, 2021. Scan Dokumen MOU PKS belum upload 4. Tahun 2022, 2023, 2024 Laporan ada, namun belum sesuai format 5. Tahun 2022, 2023, 2024 Rekap Data MOU PKS tidak sesuai format
14	Kota Lubuklinggau	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	Belum Lengkap	untuk segera melaporkan
15	Kota Pagar Alam	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✖	Belum Lengkap	1. Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 Laporan Belum Upload 2. Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 Rekap Data MOU PKS belum di upload 3. Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 Scan Dokumen MOU PKS belum upload 4. Tahun 2024 Rekap Data MOU PKS ada, tetapi belum lengkap
16	Kota Palembang	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✖	Belum Lengkap	1. Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 Laporan ada, tetapi tidak sesuai format 2. Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 Rekap Data MOU PKS ada, tetapi belum lengkap 3. Tahun 2024 Belum Upload
17	Kota Prabumulih	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✖	Belum Lengkap	1. Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 Rekap Data MOU PKS belum upload 2. Tahun 2024 Belum Upload

Sumber: Data lapangan 28-10-2024.

Masalah ini diperburuk dengan perbedaan tingkat kepatuhan yang mencolok antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Beberapa daerah menunjukkan kemampuan yang baik dalam memenuhi tenggat waktu pelaporan, menunjukkan tata kelola yang terorganisir dan adanya dukungan sumber daya yang memadai. Di sisi lain, sejumlah daerah lainnya masih belum mampu menyelesaikan pelaporan tepat waktu.

Monitoring dan evaluasi memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas serta akuntabilitas kerja sama antar daerah di Indonesia. Dalam hal ini, teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn menjadi relevan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan kerja sama daerah, khususnya dalam aspek pelaporan. Dunn menyatakan bahwa evaluasi kebijakan harus memperhatikan enam kriteria penting, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas,

dan ketepatan. Pada aspek pelaporan kerja sama daerah, kriteria-kriteria ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan pelaporan telah mencapai tujuannya.

Hasil penelitian Imam Radianto (2013) menunjukkan bahwa tantangan utama pada pelaksanaan kerja sama daerah berasal dari terbatasnya kapasitas sumber daya manusia serta lemahnya pengelolaan administrasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama. Waluyo dan Ipah (2020) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa meskipun kerja sama sudah dilaksanakan, hambatan dalam perencanaan, penganggaran, dan kurangnya dukungan politik menjadi faktor penghambat yang signifikan. Temuan-temuan ini memperkuat bahwa kelemahan pada aspek perencanaan dan pengelolaan administrasi, termasuk pelaporan, dapat menghambat efektivitas monitoring dan evaluasi kerja sama daerah.

Salah satu dampak paling terlihat dari ketidakpatuhan ini adalah terganggunya proses pengambilan keputusan strategis di berbagai tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Ketepatan waktu dan kelengkapan laporan kerja sama sangat penting, karena informasi yang terkandung di dalamnya menjadi dasar untuk menyusun langkah strategis dalam mendukung program kerja sama daerah di Sumatera Selatan. Ketika laporan tersebut tidak dilaporkan sesuai waktu yang telah ditentukan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri kehilangan sumber data yang diperlukan untuk menilai secara menyeluruh efektivitas program yang telah dilaksanakan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan informasi yang menghambat pemerintah dalam memahami situasi sebenarnya di lapangan.

Ketiadaan laporan yang memadai juga mempersulit identifikasi terhadap wilayah atau aspek tertentu yang membutuhkan perhatian, perbaikan, atau intervensi

lebih lanjut. Tanpa data yang akurat, proses perumusan kebijakan menjadi kurang optimal karena tidak didasarkan pada bukti yang relevan. Akibatnya, keputusan yang diambil berisiko tidak tepat sasaran, yang pada gilirannya dapat mengurangi dampak positif dari program kerja sama yang direncanakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Vina Zaherotul Husna (2020) yang menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan Terminal Purabaya dapat berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik, dengan catatan kerja sama dikelola secara terencana dan dilaporkan dengan baik. Ketika pelaporan tidak dikerjakan atau dikerjakan dengan tidak tepat, maka potensi dampak positif dari kerja sama daerah tidak dapat terukur secara objektif. Dengan demikian, ketidakpatuhan dalam pelaporan tidak hanya memengaruhi kinerja administratif tetapi juga berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, diharapkan melalui penelitian ini dapat ditemukan solusi permasalahan yang ada terkait kepatuhan pelaporan kerja sama daerah dan upaya peningkatan waktu pelaporan di wilayah Sumatera Selatan secara mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu “Bagaimana tingkat kepatuhan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan dalam melaporkan kerja sama daerah?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas, tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan dalam melaporkan kerja sama daerah sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan kerja sama daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kepatuhan pemerintah daerah dan mengungkap kendala yang menghambat proses pelaporan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan kontribusi pengetahuan mengenai evaluasi kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaporan kerja sama daerah dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pelaporan serta menjadi referensi untuk pengembangan teori ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan kerja sama daerah, referensi bagi pengambil kebijakan dalam penyusunan sistem yang efektif, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengembangan sistem monitoring pelaporan kerja sama daerah bagi instansi terkait dan peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, F., & Vitaloka, D. (2018). Strategi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanganan Sumber Daya Air (Studi Kasus Sungai Ciliwung). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1), 55–70. <https://doi.org/10.24905/jip.3.1.2018.55-70>
- Azis, Y.A. (2022) Fokus Penelitian Adalah: Pengertian Dan Contoh, *Deepublish Store*. Available at: <https://deepublishstore.com/blog/fokus-penelitian/>
- Barus, C. B. (2021). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. 123dok.Com. <https://123dok.Com/Article/Kriteria-Evaluasi-Konsep-Evaluasi-Landasan-Teoritis.Zlg42edl>
- Dunn, W. N. (1998). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. *Gadjah Mada University Press*.
- Fauzan, M., & Pamuji, K. (2014). Model Kerjasama Antar Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan pada Daerah Kabupaten/kota Hasil Pemekaran. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 113574. <https://media.neliti.com/media/publications/113574-ID-model-kerjasama-antar-daerah-dalam-penye.pdf>
- Fiantika, F. R. et. al. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Husna, V. Z. (2020). Kerjasama Antar Daerah Dalam Hal Pengelolaan Pelayanan Publik Dan Kaitannya Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Terminal Purabaya). *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(1), 38–47. <https://doi.org/10.21831/socia.v17i1.32599>
- Ma'ruf, M. F., & Isbandono, P. (2017). Urgensi Kerjasama Antar Daerah (*Intergovernmental*) Dalam Penanganan Bencana Alam Di Daerah. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(1), 47. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n1.p47-54>
- Memorial, M. B. K., & Ma'ruf, M. F. (2024). Analisis Pembentukan Kerjasama Antar Daerah: Sebuah Studi Efektivitas Koordinasi Bakorwil Bojonegoro Dalam Inisiasi Sekretariat Bersama Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan. *Publika*, 857-870.
- Mufidah, A. et. al. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi . CV. Media Sains Indonesia . <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/10953/>

- Munawaroh, N. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik “*Good Governance*” Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Media Birokrasi*, *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019, 142–156.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/1319>
- Nisa, T. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Rasio Likuiditas, Dan Umur Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Pelaporan Keuangan. *Journal of Enterprise and Development*, 2(2), 27–37.
<https://doi.org/10.20414/jed.v2i2.2185>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (2020)
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/196206/permendagri-no-22-tahun-2020>
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *The Journalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
<http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Putra, I. (2014). Identifikasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. *Jurnal Bina Praja*, 06(02), 157–166. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.157-166>
- Rosa, E. M. (2018). Kepatuhan (*Compliance*) – Magister Administrasi Rumah Sakit.
<https://mars.umsida.ac.id/kepatuhan-compliance/>
- Setyawan, D. (2017). Pengantar Kebijakan Publik (Cetakan I, P. 147). Intelegensi Media.
- Siallagan, D. A. F., & Siregar, N. G. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah Agar Terwujudnya Pemerintah Daerah yang Baik (*Good Government*). *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 2(2), 231–239.
<https://doi.org/10.58540/jipsi.v2i2.391>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD. In *elibrary.stikesghsby.ac.id*. ALFABETA, CV.
https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&keywords=
- Sulistiyawati. (2023). Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif . Penerbit K-Media .
<https://eprints.uad.ac.id/39780/1/>
- Tambunan, W., & Tambunan, E. S. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 93–131.
<https://doi.org/10.33541/jmp.v8i1.2968>
- Triani, K. I., & Ainy, R. N. (2024). *Upgrading* tata kelola keuangan melalui digitalisasi pelaporan keuangan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(4), 848–859.
<https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.21912>

- Umasugi, M. (2022). Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah: Studi Kerja Sama Tiga Daerah di Provinsi Maluku Utara. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 6(1), 43–54.
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadminis/article/view/5654/2372>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Wahyudi, A., & Sari, M. A. P. (2011). Kerjasama Antar Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah Dan Pelayanan Publik Di Kawasan Perbatasan. *Jurnal Borneo Administrator*, 7(3).
<https://doi.org/10.24258/jba.v7i3.77>
- Warman, Komariyah, L., & Kalsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan* , Vol. 3.
<https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/impian/article/view/2912>
- Zulfikar, W., & Jumiati, I. E. (2020). Evaluasi Kerjasama Daerah Di Kabupaten Bekasi. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 4(1). <https://doi.org/10.31506/jipags.v4i1.7818>